



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Jl. Lintas Gunungtua – Padangsidimpuan Km.11
Email: disketapangpaluta@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat nikmatnya serta karuniaNya Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dapat disusun. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini sebagai acuan dan alat monitor sekaligus sebagai upaya untuk menyahuti kebutuhan-kebutuhan operasional kantor maupun usulan ataupun tanggapan dari masyarakat guna untuk mendukung kemajuan bersama.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini disusun dengan mempedomani rencana pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dengan tujuan:

1. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan visi, misi Bupati Padang Lawas Utara;
2. Pelaksanaan perubahan rencana kerja dinas ketahanan pangan tahun anggaran 2025;
3. Pedoman umum pelaksanaan kegiatan-kegiatan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja ini belum sempurna sebagaimana harapan semua pihak, oleh sebab itu saran dan kritik diharapkan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Gunungtua, 28 Juli 2025
PR. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



IRWANSYAH RAJA, SHI,MM
Pembina
NIP. 198502282010011029

DAFTAR ISI

	Halaman
KataPengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistimatika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	21
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	21
3.3. Program dan Kegiatan.....	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	26
BAB V PENUTUP	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk rencana strategis (renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk rencana kerja (renja), sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 11 yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun sebagai amanat atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan anggaran.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan Dokumen perencanaan lainnya dimana dalam pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. “Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Ketahanan Pangan secara menyeluruh, terpadu, ekonomis, efektif, efisien dan sinergis dengan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Pembangunan Jangka menengah Propinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa agenda rancangan renja dimaknai sebagai pertimbangan atas hasil evaluasi dan monitoring perangkat daerah terhadap rencana yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan yang berusaha untuk mewujudkan ketidak sesuaian yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan memperhatikan perkembangan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau;
- b. Adanya masukan dan laporan serta pertimbangan teknis terhadap sasaran, lokasi, jenis kegiatan yang memang membutuhkan perhatian dan penanganan anggaran agar dapat membantu masyarakat yang dimaksud;
- c. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk segera menyesuaikan dan menetapkan program dan kegiatan tertentu harus dilaksanakan di tengah masyarakat.

Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup serta resiko bencana serta akan berfokus pada upaya meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 yang memuat prioritas program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan. Rancangan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Memperhatikan ketentuan proses penyusunan dan penetapan rancangan awal renja perangkat daerah untuk mekanisme perencanaan pembangunan daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan beberapa tahapan dalam rangka penyusunan ranwal renja meliputi : 1) penggalian masalah dan potensi ; 2) pembahasan lingkup dinas ketahanan pangan; 3) Pembahasan bersama stake holder; 4) Verifikasi awal oleh bappeda; 5) Forum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten-kabupaten di lingkungan provinsi sumatera utara;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (embaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4421);
- 3) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126 tambahan lembaran negara nomor 4438);
- 4) Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 104, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4700);
- 5) Undang-undang nomor 37 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten padang lawas utara di provinsi sumatera utara (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 103, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4753);
- 6) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5234;

- 7) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244; tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5887);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pereturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klassifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 440, tambahan lembaran daerah kabupaten padang lawas utara nomor 3 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten padang lawas utara 2015-2035;
- 11) Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daearah Kabupaten Padang Lawas Utara 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026;

Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;

Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan dokumen penetapan yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang penting dalam penyusunan laporan adalah pengukuran kinerja, evaluasi dan pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, selain hal tersebut juga sebagai upaya kesinambungan dalam meningkatkan kinerja.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Gambaran lengkap evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pencapaian Renstra dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan
Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	B Predikat	0	0	0	0	CC Predikat	0	0
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen/laporan perencanaan dan penganggaran	100%	0	0	0	0	100%	0	0
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Dok	0	0	0	0	6 Dok	3 Dok	50
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	3 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	33.33
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	20.00

Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan 2025

2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	0	0	0	0	100%	0	0
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	36 orang	0	0	0	0	12 orang	12 orang	33.33
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	36 Dokumen	0	0	0	0	12 Dok	12 Dok	33.33
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	3 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	33.33
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan dukungan administrasi bmd	100%	0	0	0	0	100%	100%	0
2.09.01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah skpd	3 Dok	0	0	0	0	0 Dok	0 Dok	0
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada skpd	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd	3 Dok	0	0	0	0	0 Lap	0 Lap	0
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dukungan administrasi kepegawaian	100%	0	0	0	0	100%	100%	0
2.09.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	3 Paket	0	0	0	0	0 Paket	1 Paket	33.33
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	0	0	0	0	0 orang	0 orang	0

Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan 2025

2.09.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 orang	0	0	0	0	0 orang	0 orang	0
2.09.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase dukungan pemenuhan administrasi umum		0	0	0	0			0
2.09.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 paket	0	0	0	0	2 paket	1 paket	33.33
2.09.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	0	0	0	0	2 paket	1 paket	16.66
2.09.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket	0	0	0	0	1 paket	1 paket	33.33
2.09.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	0	0	0	0	2 paket	1 paket	33.33
2.09.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 paket	0	0	0	0	2 paket	1 paket	16.66
2.09.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30 dokumen	0	0	0	0	10 dok	10 dok	33.33
2.09.01.2.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	3 paket	0	0	0	0	2 paket	1 paket	33.33
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	150 laporan	0	0	0	0	100 lap	50 lap	33.33
2.09.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Persentase pemenuhan dukungan bmd	100%	0	0	0	0	100%	100%	0

Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan 2025

	daerah									
2.09.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 unit	0	0	0	0	0 unit	0 unit	0
2.09.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	0	0	0	0	0 unit	0 unit	0
2.09.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 unit	0	0	0	0	1 unit	1 unit	33.33
2.09.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	0	0	0	0	1 unit	1 unit	33.33
2.09.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	0	0	0	0	0 unit	0 unit	0
2.09.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan dukungan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	0	0	0	0	100%	100%	0
2.09.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36 Lap	0	0	0	0	12 Lap	12 Lap	33.33
2.09.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Lap	0	0	0	0	12 Lap	12 Lap	33.33

Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan 2025

2.09.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 Lap	0	0	0	0	12 Lap	12 Lap	33.33
2.09.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	0	0	0	0	100%	100%	0
2.09.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	15 unit	0	0	0	0	5 unit	5 unit	33.33
2.09.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	3 unit	0	0	0	0	0 unit	0 unit	0
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	0	0	0	0	0 unit	0 unit	0
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan	100%	0	0	0	0	100%	100%	0
2.09.02.2.01	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung keandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan infrastruktur kemandirian pangan	100%	0	0	0	0	100%	100%	0
2.09.02.2.01.01	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	3 unit	0	0	0	0	0 unit	0 unit	0
2.09.02.2.01.02	Penyediaan infrastruktur lantai jemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia	3 unit	0	0	0	0	0 unit	0 unit	0

Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan 2025

2.09.02.2.01.03	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	60 ton	0	0	0	0	5 ton	5 ton	8.33
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	3 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	33.33
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	100%	0	0	0	0	100%	0	0
2.09.03.2.01	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan	Persentase pemenuhan infrastruktur kemandirian pangan	100%	0	0	0	0	100%	0	0
2.09.03.2.01.01	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	3 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	33.33
2.09.03.2.01.02	Penyediaan pangan berbasis sumber daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	3 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	33.33
2.09.03.2.01.06	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia yang dikembangkan	3 Unit	0	0	0	0	0 unit	0 unit	0

Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan 2025

2.09.03.2.02	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota	Persentase CPPD (cadangan pangan pemerintah daerah)	100%	0	0	0	0	100%	0	0
2.09.03.2.02.02	Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	Rencana kebutuhan pangan lokal	3 Laporan	0	0	0	0	0 Lap	0 Lap	0
2.09.03.2.02.03	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	30 ton	0	0	0	0	1 ton	4 ton	13.33
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang terpelihara	3 ton	0	0	0	0	0 ton	0 ton	0
2.09.03.2.04	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun	100%	0	0	0	0	100%	0	0
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	5 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	20.00
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita per tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	5 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	20.00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN	Persentase penurunan angka	100%	0	0	0	0	100%	100%	0

Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan 2025

	PANGAN	kemiskinan								
2.09.04.2.01	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Dokumen peta FSVA	100%	0	0	0	0	100%	100%	0
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	5 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	20.00
2.09.04.2.02	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Persentase penanganan kerawanan pangan	100%	0	0	0	0	100%	100%	0
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	5 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	20.00
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup 1 (satu) daerah kabupaten/kota	5 ton	0	0	0	0	0 ton	0 ton	0

2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase komoditas yang diawasi	100%	0	0	0	0	100%	0	0
2.09.05.2.01	<i>Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota</i>	<i>Persentase pengawasan keamanan pangan segar</i>	100%	0	0	0	0	100%	100%	0
2.09.05.2.01.05	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	5 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	20.00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		
				2024	2025	2026
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan tata Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta pelayanan yang prima	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	64,47	69,47	74,47
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,0	80,0	82,0
2	Mewujudkan perekonomian masyarakat yang maju	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pola Pangan Harapan	90	91	93

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga seharusnya lahan pertanian terus dijaga walaupun melalui peraturan perundang-undangan tentang lahan abadi demi untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Ketersediaan pangan

Ketersediaan pangan yang mencakup gizi didalamnya juga harus menjadi perhatian utama dikarenakan berpengaruh kepada kualitas hidup masyarakat diakibatkan karena makanan yang tidak bergizi cenderung membuat masyarakat tidak sehat sehingga berpengaruh pada pencapaian tingkat ekonomi masyarakat.

c. Stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga berpengaruh linier bagi ketersediaan pangan di masyarakat disebabkan jumlah pasokan yang tersedia akan berpengaruh pada tingkatan harga sebab pasokan yang menipis akan berpengaruh pada harga yang tinggi begitu sebaliknya disisi lain distribusi pangan juga menjadi variabel utama dalam memenuhi pasokan dan harga dalam hal ini prasarana dan sarana pendukung lainnya diperlukan dalam jumlah yang besar agar semua lancar dan aman.

d. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat

Pola konsumsi pangan masyarakat padang lawas utara pada umumnya masih tergantung pada satu komoditi yaitu beras sebagai sumber karbohidratnya sementara disisi lain sumber karbohidrat mempunyai banyak komoditi penawaran seperti ubi, jagung, talas dll, dan sumber protein yang dikonsumsi masih rendah.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masih rendah ditunjukkan dengan skor pola pangan harapan (PPH) penyebabnya adalah upaya pengembangan penganekaragaman konsumsi rendah karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran atas pangan bergizi, beragam, seimbang dan aman masih terbatas dan juga pengetahuan pengolahan makanan masih terbatas.

e. Kerawanan pangan melalui cadangan pangan daerah

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan penanggulangan krisis pangan. Penanggulangan krisis pangan meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan dengan upaya mobilisasi cadangan pangan. Upaya yang dilakukan antara lain : peningkatan penyediaan pangan, memenuhi kebutuhan beras masyarakat, instrument stabilisasi harga, peningkatan akses pangan, penyediaan makanan aman, bergizi dan seimbang.

f. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar

Permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam upaya penanganan pangan karena belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan.

g. Kelembagaan ketahanan pangan

Selain kelembagaan struktural dan fungsional keberhasilan pembangunan ketahanan pangan juga ditentukan oleh kelembagaan ketahanan pangan yang ada di masyarakat. Kelembagaan ketahanan pangan di masyarakat masih berjalan optimal, seperti kelembagaan lumbung pangan masyarakat (LPM) dan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM). Seluruh kelembagaan tersebut perlu mendapat sentuhan dan perhatian untuk dapat berjalan dengan baik sehingga perwujudan ketahanan pangan dapat tercapai.

Adapun permasalahan dan akar permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan meliputi :

- a. Masih lemahnya perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan cadangan pangan termasuk pemenuhan perhitungan kebutuhan yang wajar dalam memenuhi kebutuhan darurat atau insedential daerah;
- b. Masih lemahnya kebijakan daerah di bidang penentuan daerah rawan pangan yang berkesinambungan untuk dapat menjangkau target dan sasaran yang benar-benar membutuhkan seperti desa;

- c. Masih diperlukannya penguatan sosialisasi dalam upaya memaksimalkan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat sehingga dapat meningkatkan cara hidup sehat melalui panganan yang sehat dan bergizi;
- d. Masih diperlukannya penguatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya peningkatan ketahanan pangan baik di institusi dan di masyarakat;
- e. Perlu adanya penguatan pengawasan, evaluasi serta pelaporan dalam penyelenggaraan kegiatan di masyarakat sehingga dapat diperoleh tantangan dan peluang yang lebih akurat.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan, sebabnya ke depan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan. Selanjutnya perlu diperhatikan permasalahan dan akar permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja	Masalah	Akar Permasalahan
1	Penguatan cadangan pangan/ketersediaan pangan utama masyarakat	1. Belum dapat diwujudkan jumlah stok pangan melalui lumbung pangan masyarakat yang aman dan kondusif; 2. Angka ketersediaan cadangan pangan di pemerintah melalui perum BULOG masih rendah penganggrannya dari Pemerintah Daerah	1. Masih enggan masyarakat melalui kesadaran bersama dan bermasyarakat dikarenakan hasil panen lebih banyak di berikan ke pasaran tanpa menyisihkan untuk stok pangan masyarakat; 2. Rendahnya penganggaran dari pemerintah daerah yang diputuskan dalam upaya pengelolaan stok pemerintah daerah

2	Skor pola pangan harapan (PPH), ketersediaan energi, dan ketersediaan protein perkapita/tahun	1. Belum pernah tercapainya indikator kinerja renstra sesuai dengan target skor pola pangan harapan	1. Masyarakat masih condong untuk mengutamakan nilai karbohidrat melalui beras sementara komponen lainnya masih belum prioritas; 2. Pendapatan ekonomi masyarakat yang belum merata sehingga dalam pola pikirnya masih jauh untuk memenuhi kebutuhan komponen lainnya dengan baik
---	---	---	---

3	Daerah rentan rawan pangan	1. Masih berfluktuasinya peresentase penanganan desa rentan rawan pangan sehingga masih perlu penanaganan yang baik; 2. Harga pangan pokok yang sering berfluktuasi akibatnya pola distribusi pangan tidak mendukung masyarakat	1. Disebabkan adanya fluktuasi penyediaan sarana dan prasarana di desa sehingga status layanan desa rawan pangan menjadi imbasnya; 2. Sering berubahnya kebijakan pemerintah daerah atas penetapan lokus dan fokus pengembangan sarana dan prasarana sehingga varaibel yang direncanakan dari awal bergeser.
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	1. Masih adanya temuan kasus ketidakamanan pangan; 2. Belum maksimalnya jumlah sampel dan lokasi yang menjadi sasaran kinerja.	1. Belum maksimalnya kinerja antar lintas sektoral sehingga adanya kecolongan; 2. Masih adanya pertambahan lokasi pasar yang baru sehingga perlu adanya perhatian dari pemda

Selanjutnya perlu diperhatikan penghambat dan pendorong yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, yaitu sebagai berikut:

a) Penghambat

- Infrastruktur pertanian seperti sumber-sumber air untuk irigasi beserta jaringan irigasi desa, jalan pertanian, dan kelembagaan pertanian belum optimal sehingga berpengaruh terhadap penyediaan pangan dan lumbung pangan masyarakat;
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan petani dalam membangun kemitraan dengan berbagai stake holder/pelaku usaha dan terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian;

- Belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam upaya peningkatan penganekaragaman pangan sehari-hari yang mengutamakan tumpuan pada jenis makanan karbohidrat tinggi tanpa dibarengi dengan kecukupan protein dan lemak serta vitamin;
- Masih belum maksimalnya penanganan informasi tentang daerah rawan dan rentan pangan sehingga penanganan dan pengalokasian dana serta kegiatan belum dirasakan maksimal ditambah lagi perlu adanya koordinasi antar sektoral yang lebih intensif.

b) Pendorong

- Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta keterampilan petani melalui bimtek, kursus, magang dan sekolah lapang;
- Pengembangan komoditas pertanian unggulan sehingga berupaya dalam peningkatan ketahanan pangan;
- Pengembangan sentra kawasan pertanian terpadu dengan fungsi produksi, edukasi, penelitian, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga upaya peningkatan keanekaragaman pangan dapat dilakukan dengan baik;
- Diversifikasi usaha dan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian melalui penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sehingga upaya peningkatan pengolahan pangan dalam kebutuhan sehari-hari dapat lebih maksimal;

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, penghambat dan pendorong yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, dapat diformulasikan isu-isu penting yang perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya distribusi pasokan pangan;
- 2) Belum adanya keanekaragaman dan keamanan pangan masyarakat;
- 3) Belum maksimalnya cadangan pangan pemerintah daerah;
- 4) Belum optimalnya lumbung pangan masyarakat sebagai cadangan pangan masyarakat;
- 5) Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan.

Tabel 2.3
Faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah

No	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Jumlah stok pangan belum dapat tercukupi dengan angka aman dan kondusif	Belum adanya kerjasama yang Kondusif antara masyarakat dengan lumbung pangan Karena tingkat kepercayaan masih rendah	Perlu adanya sosialisasi dan pendekatan secara masif bagi pemerintah daerah untuk mendukung pengisian lumbung pangan
2	Angka ketersediaan cadangan pangan di pemerintah masih kurang anggarannya	Belum tepatnya jumlah anggaran yang dialokasikan dengan tepat dan sesuai	Perlu adanya informasi atau database yang bisa memberikan kepercayaan bagi pemda dan dprd dalam hal memutuskan kebutuhan anggaran
3	Indikator kinerja tentang skor pola pangan harapan masih kurang	Persentase capaian skor pola pangan harapan masih belum memadai	Perlu adanya upaya sosialisasi bagi masyarakat tentang merubah kebiasaan lama dengan memberikan bandingan sesuai dengan perspektif kesehatan
4	Fluktuasi harga pangan pokok	Pola ketersediaan wilayah berbeda-beda perlu adanya solusi dan perhatian	Hendaknya lokus dan fokus kebijakan pemda dalam penyediaan anggaran sarana harus Mengutamakan wilayah berpotensi rentan dan rawan pangan
5	Fluktuasinya persentase desa rentan rawan pangan	Adanya fluktuasi penyediaan sarana dan prasarana sehingga status layanan berpengaruh buruk	Hendaknya lokus dan fokus kebijakan pemda dalam penyediaan anggaran sarana harus Mengutamakan wilayah berpotensi rentan dan rawan pangan
6	Faktor ketidakamanan pangan di pasar	Belum maksimalnya kinerja lintas sektoral	Koordinasi dan sinkronisasi perihal penanganan ketidakamanan pangan
7	Jumlah sampel panganan aman masih kurang	Masih adanya lokasi pasar yang belum termonitor	Koordinasi dan sinkronisasi serta pengawalan bagi lokasi pasar yang baru sehingga resiko dapat ditekan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel.2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Ketahanan
Pangan Kab.Padang Lawas Utara

No	Program/Kegiatan	Rancangan RKPD				Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Kebutuhan Dana (Rp)
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Lawas Utara	Persentase Dukungan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.231.384.428	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Lawas Utara	Persentase Dukungan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.231.384.428
	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya Dukungan Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	250.550.400	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya Dukungan Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	250.550.400
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Padang Lawas Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	30 Dok	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Padang Lawas Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	30 Dok	10.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Kab.Padang Lawas Utara	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 Paket	3.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab.Padang Lawas Utara	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 Paket	3.000.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Knsultasi SKPD	Kab.Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	210.550.400	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Knsultasi SKPD	Kab.Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	210.550.400
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	4.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	4.000.000

	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	6.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	6.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	5.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	5.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	6.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	6.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	6.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	6.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	4.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	4.000.000
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	2.000.000	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	2.000.000

No	Program/Kegiatan	Rancangan Akhir RKPD				Program/Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Kebutuhan Dana (Rp)
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab.Padang Lawas Utara	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	2.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab.Padang Lawas Utara	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	2.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Padang Lawas Utara	Tersedianya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	249.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Padang Lawas Utara	Tersedianya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	249.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	30.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	216.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		216.000.000
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya dukungan dokumen/laporan perencanaan dan penganggaran	100%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya dukungan dokumen/laporan perencanaan dan penganggaran		10.000.000

	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	4.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	4.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat SKPD	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat SKPD	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya Dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	33.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya Dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	33.000.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 Unit	1.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 Unit	1.000.000

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Akhir RKPD				Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Kebutuhan Dana (Rp)
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	32.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	32.000.000
	Administrasi Keuangan Pereangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya dukungan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.681.834.028	Administrasi Keuangan Pereangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya dukungan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.681.834.028
	Penyediaan gaji	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	144 ob	1.545.554.028	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	144 ob	1.545.554.028
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	12 Dok	131.280.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	12 Dok	131.280.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	1 Laporan	5.000.000

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya dukungan pengelolaan administrasi barang milik daerah	100%	2.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya dukungan pengelolaan administrasi barang milik daerah	100%	2.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah skpd	1 Dok	1.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah skpd	1 Dok	1.000.000
	Penatausahaan barang milik daerah pada skpd	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada skpd	1 Laporan	1.000.000	Penatausahaan barang milik daerah pada skpd	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada skpd	1 Laporan	1.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya dukungan Laporan Administrasi Kepegawaian	100%	22.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya dukungan Laporan Administrasi Kepegawaian	100%	22.600.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	1.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	1.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 orang	1.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 orang	1.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	16 paket	21.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	16 paket	21.600.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kab. Padang Lawas Utara	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	100%	21.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN	Kab. Padang Lawas Utara	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	100%	21.000.000

						PANGAN				
	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara	Pemenuhan dukungan infrastruktur	100%	21.000.000	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara	Pemenuhan dukungan infrastruktur	100%	21.000.000
	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah infratraktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	1 unit	1.000.000	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah infratraktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	1 unit	1.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur logistik	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	1 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur logistik	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	1 Laporan	20.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kab. Padang Lawas Utara	Persentase pemenuhan dukungan informasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok	100%	116.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kab. Padang Lawas Utara	Persentase pemenuhan dukungan informasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok	100%	116.000.000
	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya dukungan kebutuhan daerah dalam upaya stabilisasi dan pasokan harga pangan	100%	37.000.000	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya dukungan kebutuhan daerah dalam upaya stabilisasi dan pasokan harga pangan	100%	37.000.000
	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	15.000.000	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Kab. Padang Lawas Utara	Tersedianya pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	15.000.000
	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan	1 unit	2.000.000	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia	Kab. Padang Lawas Utara			

			toko tani indonesia yang dikembangkan							
	Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara	Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	1 Laporan	20.000.000	Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara	Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	1 Laporan	20.000.000
	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara	Terpenuhinya informasi pengelolaan dan kelembagaan cadangan pangan	1 Laporan	55.000.000	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara	Terpenuhinya informasi pengelolaan dan kelembagaan cadangan pangan	1 Laporan	55.000.000
	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	4 ton	52.000.000	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	4 ton	52.000.000
	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang terpelihara	1 ton	3.000.000	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang terpelihara	1 ton	3.000.000
	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Kab. Padang Lawas Utara	Terpenuhinya pola pangan harapan	1 Laporan	24.000.000	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Kab. Padang Lawas Utara	Terpenuhinya pola pangan harapan	1 Laporan	24.000.000
	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya	1 Laporan	4.000.000	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	4.000.000

			lokal							
	Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita/per tahun	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita per tahun	1 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita/per tahun	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita per tahun	1 Laporan	20.000.000
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kab. Padang Lawas Utara	Pemenuhan dukungan dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan	100%	71.073.600	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kab. Padang Lawas Utara	Pemenuhan dukungan dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan	100%	71.073.600
	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	Kab. Padang Lawas Utara	Pemenuhan dukungan sebaran informasi kerentanan dan ketahanan pangan	1 dok	26.073.600	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	Kab. Padang Lawas Utara	Pemenuhan dukungan sebaran informasi kerentanan dan ketahanan pangan	1 dok	26.073.600
	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Kab. Padang Lawas Utara	Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1 dok	26.073.600	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Kab. Padang Lawas Utara	Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1 dok	26.073.600
	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara	Pemenuhan dukungan informasi kebutuhan pengelolaan dan status wilayah rentan rawan pangan	1 dok	45.000.000	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara	Pemenuhan dukungan informasi kebutuhan pengelolaan dan status wilayah rentan rawan pangan	1 dok	45.000.000

Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan 2025

	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadagan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dala 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup dalam 1 daerah kabupaten/kota	1 dok	5.000.000	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadagan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dala 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup dalam 1 daerah kabupaten/kota	1 dok	5.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	40.000.000
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kab. Padang Lawas Utara	Persentase komoditas pangan yang diuji bahan residu pangan	100%	35.000.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kab. Padang Lawas Utara	Persentase komoditas pangan yang diuji bahan residu pangan	100%	35.000.000
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten?kota	Kab. Padang Lawas Utara	Terpenuhinya upaya uji bahan residu pangan	1 dok	35.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten?kota	Kab. Padang Lawas Utara	Terpenuhinya upaya uji bahan residu pangan	1 dok	35.000.000
	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten?kota	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 dok	35.000.000	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten?kota	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 dok	35.000.000
J U M L A H (Rp)					2.497.058.028					2.497.058.028

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demonkratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program dan kegiatan dalam Dokumen Rencana Kerja perangkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka ada pemangku usulan kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan uraian di atas, maka ada pemangku usulan kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain sebagai berikut :

1. Setelah mengikuti agenda Musyawarah rencana pembangunan daerah desa, kemudian musrenbang kecamatan dan sampai pada agenda musrenbang kabupaten diperoleh tidak adanya usulan masyarakat yang melekat pada tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sehingga dapat disimpulkan masyarakat belum ada yang mengusulkan program dan kegiatan.

BAB III.**TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA****3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pemerintah mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan tahun 2025 sebagai awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3-5,6 persen. Selain itu pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6-7 persen serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,5-5 persen.

“Sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 adalah antara sekitar 5,3-5,6 persen, kemudian tingkat kemiskinan itu antara 6-7 persen, kemudian tingkat pengangguran terbuka juga turun.

VISI BAPANAS (Badan Pangan Nasional)

“ Terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional berbasis Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan untuk Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berdasarkan Gotong-Royong”.

MISI BAPANAS (Badan Pangan Nasional)

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan;
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi;
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan pangan dan gizi yang berkualitas untuk hidup sehat, aktif dan produktif;
6. Mengelola badan pangan nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan

Pada penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Tujuan RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, kemudian renstra menterjemahkan RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dimana Tujuan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan adalah **“Memantapkan Ketahanan Pangan Daerah”**

Adapun Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah:

- (1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.
- (2) Meningkatnya ketersediaan produksi pangan utama masyarakat;
- (3) Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat;
- (4) Meningkatnya pengawasan keamanan segar asal tumbuhan.

Tujuan dari Rencana Kerja (Rencana kerja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah yakni Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara disusun sebagai bahan acuan dalam melaksanakan program kegiatan dan strategi yang menyangkut kebijakan tahunan untuk mewujudkan sasaran dan target yang ingin dicapai agar terarah dan terpadu.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan juga bermanfaat untuk memonitor capaian pelaksanaan di Lapangan yang telah direncanakan apakah capaian tersebut memuaskan atau perlu adanya kajian kembali dalam memperoleh target tahunan pada tahun berikutnya serta juga untuk mempermudah pihak Pengawas Keuangan untuk Menilai capaian penggunaan Anggaran baik bersumber dari APBN maupun dari Dana APBD yang pada saat ini ditekankan untuk bersifat Transparan dan Akuntabel terhadap Pelaksanaan dan Rencana Kegiatan OPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan beberapa tahun mendatang, yaitu: meningkatkan kesejahteraan petani, baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kesejahteraan petani tersebut maka diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga lebih baik atau lebih berkualitas.

Adapun strategi dan kebijakan untuk melaksanakan sasaran dan tujuan diatas dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel.3.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	1. Mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih atau googovernance 2. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan daerah	1. Aparatur kantor serta perangkat kantor lainnya; 2. Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat	1. Menyediakan kebutuhan dan keperluan dalam menggerakkan organisasi serta aparatur kantor sehingga dapat berfungsi secara optimal, efektif dan efisien; 2. Membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi lokal dan cadangan pangan masyarakat sebagai bagian sistem logistik pangan dan sistem pangan berkelanjutan; 3. Mempromosi kan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan; 4. Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat.	1. Pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan yang cukup dan terjangkau; 2. Pengembangan sarana dan prasarana cadangan pangan masyarakat; 3. Pembinaan kelembagaan lumbung pangan masyarakat

		3. Meningkatkan kecukupan energi dan keberagaman pangan masyarakat	1. Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman 2. Mendukung penyaluran bantuan pangan atau pangan bersubsidi sesuai pola konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan kekurangan pangan	1. Pembinaan terhadap diversifikasi konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman 2. Penanganan daerah/desa rentan rawan pangan
		4. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan	3. Mendorong kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	3. Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan di pedagang pengumpul.

Adapun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 adalah sebagai mana tabel berikut:

Tabel.3.2.
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025
1.	Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Bidang Pangan	1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Yang Prima di Bidang Pangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	69,47
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (IKM)	80,00
2.	Mewujudkan perekonomian masyarakat yang maju	2.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pola Pangan Harapan	91,00

3.3 Program dan Kegiatan

Secara garis besar rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 46 (dua belas) sub kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. **2.497.058.028,00,-** dapat dilihat pada table 3.3 berikut ini :

Tabel.3.3.
Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan
1	2
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
	Evaluasi kinerja perangkat daerah
	Administrasi keuangan perangkat daerah
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd
	Administrasi barang milik daerah
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang
	Penatausahaan barang milik daerah pada skpd
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
	Administrasi umum perangkat daerah
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan peralatan rumah tangga
	Penyediaan bahan logistik kantor
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Penyediaan bahan/material
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

	Pengadaan mebel
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
	<i>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>
	Penyediaan jasa surat menyurat
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
	Pemeliharaan mebel
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
	<i>Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota</i>
	Penyediaan infrasturktur lumbung pangan
	Penyediaan infrastruktur rantai jemur
	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	<i>Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan</i>
	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan
	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal
	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia
	<i>Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota</i>
	Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal
	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota
	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota
	<i>Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</i>
	Pemberdayaan masyarakat dalam panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
	<i>Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan</i>
	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan pangan kewenangan kabupaten/kota
	<i>Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota</i>
	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota

	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	<i>Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota</i>
	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Indikator kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap organisasi. IKU atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara serta mendukung prioritas pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah maupun dalam pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dalam mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025, rencana kerja dan pendanaan tahun 2025, diarahkan untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragmaan konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan pangan dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Padang Lawas Utara.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indicator kinerja program (outcomes)/kegiatan (output) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3,

Tabel 3.4.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS KETAHANAN PANGAN							2.885.156.840,00	2.878.790.505,00	2.356.650.398,00						2.704.980.567,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.885.156.840,00	2.878.790.505,00	2.356.650.398,00						2.704.980.567,00		
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							2.885.156.840,00	2.878.790.505,00	2.356.650.398,00						2.704.980.567,00		
1	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dokumen / Laporan Perencanaan dan Penganggaran				100 %	100 %	2.488.847.240,00	2.482.480.905,00	2.041.804.798,00							2.260.906.967,00	
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dukungan Dokumen/Lapo ran Perencanaan dan Penganggaran	-			8 Dokumen	8 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara		10.000.000,00	DINAS KETAHAN AN PANGAN
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	DINAS KETAHAN AN PANGAN
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	DINAS KETAHAN AN PANGAN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	DINAS KETAHAN AN PANGAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			3 Laporan	3 Laporan	1.832.795.94 0,00	1.826.429.605,00	1.826.429.605,0 0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara		1.684.756.567,0 0	DINAS KETAHAN AN PANGAN
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bul an	12 Orang/bul an	1.710.075.94 0,00	1.703.709.605,00	1.604.433.698,0 0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.548.476.567,0 0	DINAS KETAHAN AN PANGAN
	2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	117.720.000, 00	117.720.000,00	20.430.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			131.280.000,00	DINAS KETAHAN AN PANGAN
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.198.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	DINAS KETAHAN AN PANGAN

	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dukungan Pengelolaan Adminstrasi Barang Milik Daerah	-			2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara			23.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

[illegible]

[illegible]

						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	-	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara		23.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.885.156.840,00	2.878.790.505,00	2.356.650.398,00						2.704.980.567,00		
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								2.885.156.840,00	2.878.790.505,00	2.356.650.398,00						2.704.980.567,00		
5	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.488.847.240,00	2.482.480.905,00	2.041.804.798,00								2.260.906.967,00	
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dukungan Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			8 Dokumen	8 Dokumen	302.077.600,00	302.077.600,00	302.077.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara		250.550.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.968.500,00	1.968.500,00	1.968.500,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	21.031.300,00	21.031.300,00	10.928.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	4.196.600,00	4.196.600,00	2.509.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	4.993.200,00	4.993.200,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					30 Dokumen	30 Dokumen	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																		

							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	50 Laporan	248.088.000,00	248.088.000,00	88.246.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				215.550.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	-	13.312.500,00	13.312.500,00	13.312.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Unit	0 Unit	5.673.400,00	5.673.400,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Unit	0 Unit	7.639.100,00	7.639.100,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-	263.201.200,00	263.201.200,00	263.201.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara		249.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.050.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	46.960.000,00	46.960.000,00	38.800.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	213.241.200,00	213.241.200,00	213.241.200,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				216.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			6 Unit	6 Unit	65.460.000,00	65.460.000,00	65.460.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara			36.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	65.460.000,00	65.460.000,00	28.200.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				34.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																			

							Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
6	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-				-	-	11.677.000,00	11.677.000,00	10.273.000,00							23.000.000,00	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	11.677.000,00	11.677.000,00	11.677.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani		23.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																	
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemulihan Ekonomi			3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik					1 Laporan	1 Laporan	11.677.000,00	11.677.000,00	10.273.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemulihan Ekonomi			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
7	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Informasi Penyediaan dan Peyaluran Pangan Pokok					100 %	100 %	271.039.500,00	271.039.500,00	206.439.500,00							315.000.000,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dukungan kebutuhan daerah dalam upaya stabilisasi dan pasokan harga pangan	-				1 Laporann	1 Laporann	165.039.600,00	165.039.600,00	165.039.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemulihan Ekonomi	Kelompok Tani		235.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia					1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	11.800.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemulihan Ekonomi			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					1 Laporan	1 Laporan	150.039.600,00	150.039.600,00	101.769.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemulihan Ekonomi			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																		
							Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemulihan Ekonomi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		

							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota					1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemulihan Ekonomi			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN							
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-				-	-	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00			-	Pemulihan Ekonomi	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN							
	2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																									
							Rencana Kebutuhan Pangan Lokal					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemulihan Ekonomi			1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN							
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																									
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					4 Ton	4 Ton	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemulihan Ekonomi			52.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN							
	2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																									
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara					5 Ton	5 Ton	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemulihan Ekonomi			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN							
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terpenuhinya Pola Pangan Harapan	-				1 Laporan	1 Laporan	53.999.900,00	53.999.900,00	53.999.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemulihan Ekonomi	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN							
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																									
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					1 Laporan	1 Laporan	34.000.000,00	34.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemulihan Ekonomi			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN							

	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																			
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun					1 Laporan	1 Laporan	19.999.900,00	19.999.900,00	9.869.900,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemulihan Ekonomi				20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
8	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pemenuhan Dukungan Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	78.593.100,00	78.593.100,00	73.253.100,00									71.073.600,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Pemenuhan Dukungan Sebaran Informasi Kerentanan dan Ketahanan Pangan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	14.736.600,00	14.736.600,00	14.736.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemulihan Ekonomi	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara			26.073.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																			
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.736.600,00	14.736.600,00	14.736.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemulihan Ekonomi				26.073.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Dukungan Informasi Kebutuhan Pengelolaan dan Status Wilayah Rentan Rawan Pangan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	63.856.500,00	63.856.500,00	63.856.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemulihan Ekonomi	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemulihan Ekonomi				5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	

							Daerah Kabupaten/Kota																	
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	63.856.500,00	63.856.500,00	58.516.500,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-				40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
9	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-				-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	24.880.000,00								35.000.000,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			-	Pemulihan Ekonomi	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	24.880.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemulihan Ekonomi				35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	J U M L A H												2.885.156.840,00	2.878.790.505,00	2.356.650.398,00							2.704.980.567,00		

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Ketahanan Pangan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026;

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan ini berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029, dimana seluruh program beserta indikatornya pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja 2025. Adapun pada level kegiatan dan subkegiatan, tidak semua kegiatan maupun subkegiatan yang ada pada Renstra untuk tahun 2025 termuat dalam Renja 2025;

Indikator *output*/keluaran pada subkegiatan selain mengacu pada indikator yang terdapat dalam Renstra Tahun 2021-2026 juga mengacu pada indikator *output* yang dibakukan dengan Kepmendagri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara ini juga berpedoman pada RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Renja Dinas Ketahanan Pangan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025;

Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.

Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun Anggaran 2025.

Gunungtua, 28 Juli 2025
Pdt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



IRWAN SYAH RAJA, SHI, MM
Pembina
NIP. 198502282010011029